

Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond oleh Perusahaan Asuransi di Indonesia

INTISARI

Ferawati Margaretta Nainggolan¹ dan Veri Antoni²

Penelitian ini membahas pengaruh Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap pelaksanaan penjaminan *surety bond* oleh perusahaan *surety bond* oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan *surety bond* oleh perusahaan asuransi di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan) berlaku serta mengalisa pengaruh yang ditimbulkan U UU Penjaminan bagi perusahaan asuransi yang melaksanakan bisnis penjaminan *surety bond* di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai akibat dari disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan terhadap kegiatan penjaminan oleh perusahaan asuransi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan teknik analisis data normatif-kualitatif dan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum berlakunya UU Penjaminan, kondisi pasar *surety bond* didominasi oleh perusahaan asuransi, dimana terdapat 50 (lima puluh) perusahaan asuransi yang memiliki izin penerbitan *surety bond* dan 2 (dua) konsorsium perusahaan asuransi penerbit *surety bond*, sedangkan hanya terdapat 21 (dua puluh satu) perusahaan penjaminan yang dapat menerbitkan *surety bond*. Dengan berlakunya UU Penjaminan, maka perusahaan asuransi hanya dapat menerbitkan *surety bond* sampai jangka waktu 3 (tiga tahun) sejak UU Penjaminan terbit. Kondisi ini menyebabkan status konsorsium penjaminan menjadi tidak jelas dan menimbulkan kerugian bagi konsumen *surety bond* yang selama ini lebih banyak menggunakan jasa perusahaan asuransi. Diharapkan, ke depannya pemerintah dan OJK dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur kerjasama antara perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan untuk menerbitkan *surety bond*, dalam upaya mempertahankan kapasitas penjamin *surety bond* kepada masyarakat luas.

Kata kunci : Undang-Undang Penjaminan, *surety bond*, perusahaan asuransi.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

The Legal Review of The Implementation of Surety Guarantee by Insurance Companies in Indonesia According to Act Number 1 of 2016 about Guarantee

ABSTRACT

Ferawati Margaretta Nainggolan³ and Veri Antoni⁴

This research aims to know the effects of Act No. 1 of 2016 about Guarantee (Guarantee Act) to the insurance companies who issue surety bonds in Indonesia. The purpose of this research is to know the condition of surety bonds issuance by insurance company before Act No. 1 Year 2016 about Guarantee (Guarante Act) applied, and to analyze the effect for the insurance company who issue surety bonds after Guarantee Act applied.

This is a normative research with descriptive characteristics. The focus of this research is to know the consequences of Act Number 1 of 2016 about Guarantee towards the insurance companies who release *surety bonds*. The technique of collecting data by library research with normative-qualitative data analysis technique and inductive reasoning.

The conclusion of the research is insurance company dominated the market of surety bonds in Indonesia, which there are 50 (fifty) insurance companies and 2 (two) consortiums of insurance companies that have licences to issue surety bonds, but there are only 21 (twenty one) guarantee companies who can issue surety bonds. With the presence of the Guarante Act, insurance company only have rights to issue surety bonds in 3 (three) years since the Act published. This condition causes obscurity status for the surety bonds consortiums and disadvantages of the consumer who have been using the services from insurance companies. It is expected that in the future the government and financial authority can issue regulations about the cooperation between insurance companies and guarantee companies, in order to maintain surety bond guarantee capacity for the public.

Keywords: The Guarantee Act, surety bonds, insurance companies.

³ Master of Legal Science, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

⁴ Department of Business Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.